

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, van. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Bungi Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Effendy, Marwan. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. (Jakarta: Referensi, 2013).
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. (Jakarta: Referensi, 2012).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakuknya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000).
- Lopa, Baharuddin. dan Moch Yamin. *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. (Bandung: Alumni, 2001).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, Hambatan*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Wijaya, Firman *Whistle Blower dan Justice Collaborator*. (Jakarta: Penaku, 2012).

Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*. (Jakarta: FE UI, 1996).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015).

_____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

_____. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

_____. *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi*.

C. Internet

Abu Samman Lubis, “Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, www.bppk.kemenkeu.go.id, 11 Januari 2011

Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2017”, www.bps.go.id, Diakses 30 Agustus 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tentang KPK”, www.kpk.go.id,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Tentang Kami”,
www.lpse.lkpp.go.id.

Sudut Hukum, “KPK Merupakan Lembaga Negara Bantu”,
www.suduthukum.com, 30 Mei 2017

CNN Indonesia, “Setnov Hadapi Tuntutan Kasus Korupsi e-KTP Hari Ini”,
www.cnnindonesia.com, 29 Maret 2018